



Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Retribusi Tiket Entrance Untuk Meningkatkan APBDes Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan

Ni Putu Seni Pradnya Setyawati *

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Juwita Pratiwi Lukman

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: senipradnya03@gmail.com

Abstract

This study focuses on the process of Collaborative Governance in the management of entrance ticket retribution to improve the APBDes of Jatiluwih Tourism Village, Penebel District, Tabanan Regency. This study uses qualitative methods with a descriptive approach. The findings of this study indicate that the collaboration is already well underway. Of the 5 indicators, all have gone well and are also effective. These indicators are face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. Although all has gone well, the recommendations that can be given in the management of entrance ticket fees in Jatiluwih Village, which can optimize the digital system on tourist tickets, and provide training, as well as understanding the village community to be more involved in the management of advertising, because many positive impacts will be felt by the community.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism ticket management, Village Revenue and expenditure

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan retribusi tiket *entrance* untuk meningkatkan APBDes Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berjalan dengan baik. Dari 5 indikator semua telah berjalan dengan baik dan juga efektif. Indikator tersebut yaitu *face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, intermediate outcome*. Meski semua telah berjalan dengan baik, adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam pengelolaan retribusi tiket *entrance* di Desa Jatiluwih, yaitu dapat mengoptimalkan sistem digital pada tiket wisata, dan memberi pelatihan, serta pemahaman kepada masyarakat desa agar lebih banyak terlibat dalam pengelolaan pariwisata, karena banyak dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Kata kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Tiket Wisata, Pendapatan dan Belanja Desa

I. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu industri yang berpengaruh besar dalam perekonomian Indonesia. Melihat banyak hal unik dari kekayaan alam hingga budaya yang membuat para turis atau wisatawan manca negara banyak berkunjung ke Indonesia. Sektor pariwisata memiliki dampak yang penting dan menjadi salah satu penyumbang devisa utama dalam penumpu perekonomian nasional (Purwowidhu, 2023). Pariwisata dapat berkembang dengan melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap destinasi wisata, baik dari perkembangan potensi kelembagaan pariwisata, potensi strategi promosi, dan pembangunan ekonomi kreatif. Potensi- potensi tersebut dapat dijadikan acuan dan landasan oleh pemegang kebijakan dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia dengan mengutamakan sektor pariwisata sebagai sumber pemasukan ekonomi.

Pulau Bali sangatlah identik dengan keindahan alam yang dimiliki, sehingga menjadi tempat destinasi pariwisata yang banyak diminati para wisatawan. Pulau Bali mempunyai warisan budaya yang kental dan identik dengan berbagai tradisi daerah nya masing-masing. Desa wisata adalah wilayah atau kawasan pedesaan yang identik dengan berbagai daya tarik wisata. Desa wisata disusun dengan menarik dan indah agar wisatawan dapat berkunjung, tinggal ataupun menetap di desa tersebut dan dapat belajar budaya Indonesia atau budaya desa tersebut sehingga dapat terlibat dalam kegiatan masyarakat desa. Mulai dari adat istiadat, social budaya, dan kehidupan sosial ekonomi yang masih khas dan tradisional sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan dari komponen kepariwisataan, kuliner, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Beberapa desa banyak yang menarik dengan keindahan alamnya sehingga menjadi tujuan para wisatawan untuk berlibur dengan menikmati suasa pedesaan yang asri dan tenang.

Tabel 1. Data Desa Wisata Provinsi Bali

Kabupaten / Kota	Data Jumlah Desa Wisata Provinsi Bali Juni, 2024
Kab. Buleleng	75 Desa Wisata
Kab.Tabanan	25 Desa Wisata
Kab. Badung	17 Desa Wisata
Kab. Gianyar	32 Desa Wisata
Kab. Bangli	31 Desa Wisata
Kab. Karangasem	26 Desa Wisata
Kab. Klungkung	19 Desa Wisata
Kab. Jembrana	7 Desa Wisata
Kota Denpasar	6 Desa Wisata
Prov. Bali	238 Desa Wisata

Sumber: Survei Statistik Pariwisata Daerah, BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Salah satu desa yang menarik perhatian banyak wisatawan karena keunikan persawahan terasering dan suasana yang menenangkan yaitu Desa Wisata Jatiluwih, terletak pada Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan- Bali. Desa Jatiluwih menjadi sebuah permata geografis yang tersembunyi di lereng Gunung Batukaru, memiliki ketinggian sekitar 685 meter MDPL. Desa Wisata Jatiluwih dikenal secara internasional sejak tanggal 29 Juni 2012 karena sistem pengairan sawah tradisionalnya, yang dikenal dengan nama subak. UNESCO telah mengakui Desa Wisata Jatiluwih dikenal dengan salah satu Desa Warisan Budaya Dunia, karena sistem subak ini mencerminkan filosofi Tri Hita Karana dari ajaran Hindu, yang menekankan keseimbangan dan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Desa Jatiluwih dikelilingi oleh hutan lindung seluas 24 hektar dan memiliki banyak jenis flora dan fauna, termasuk hewan langka seperti kukang Jawa. Selain menawarkan panorama sawah terasering yang memukau, Desa Jatiluwih juga menyediakan fasilitas untuk aktivitas luar ruang seperti trekking dan bersepeda melalui jalur yang menghubungkan sawah dengan hutan. Di samping itu, desa ini menjadi tempat diadakannya festival dan upacara tradisional, yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan dan mengalami kekayaan budaya serta tradisi lokal di wilayah tersebut.

Keunikan Desa Jatiluwih tidak hanya terletak pada sistem subak yang berfungsi sebagai irigasi sawah, tetapi juga sebagai pusat produksi beras merah dengan kualitas unggul. Aktivitas yang bisa dilakukan di desa wisata Jatiluwih antara lain: berkeliling desa naik sepeda atau pun *tracking* melewati hamparan persawahan yang asri. Melihat pemandangan dengan menaiki VW (Volkswagen Safari), dan *cooking class* yang diselenggarakan oleh Kubu *Terrace* Jatiluwih. Inovasi perkembangan yang telah diterapkan oleh desa wisata Jatiluwih seperti adanya bus listrik yang sejalan dengan program pemerintah Bali memiliki tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Para wisatawan yang berkunjung ke Desa Jatiluwih akan dikenakan biaya retribusi tiket wisata atau tiket *entrance*.

Dalam meningkatkan APBDes Desa Jatiluwih, para *stakeholder* mempunyai perjanjian kerja sama dengan lima pihak. Dalam meningkatkan pendapatan desa wisata terutama memanfaatkan pendapatan dari retribusi tiket wisata tersebut. *Collaborative Governance* di Desa Jatiluwih yaitu dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar pihak desa dan pemerintah daerah. Tercantum pada Surat PKS Nomor 556 / 1530 / DISPAR (ADDENDUM PKS 2024). Lima pihak yang ikut turut berkolaborasi atau bekerja sama yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan yang diwakili Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Kepala Desa Jatiluwih, Desa Adat

Jatiluwih, Desa Adat Gunung Sari, Pekaseh atau Subak Desa. Dalam perjanjian kerjasama tentu para stakeholder mempunyai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing agar pendapatan melalui retribusi tiket wisata selalu meningkat. Isi dari Surat PKS mengenai tugas dan kedudukan para pihak kolaborasi sebagai berikut: Pihak pertama (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tabanan) mempunyai tugas pemegang kebijakan berwenang mengatur penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan. Pihak kedua (Pemerintah Desa Jatiluwih) mempunyai tugas yang mewilayahi Daya Tarik Wisata Jatiluwih bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Jatiluwih. Pihak ketiga (Bendesa Adat Jatiluwih) mempunyai tugas untuk mengkoordinasi penyelenggaraan aktifitas ritual di Desa Pakraman Jatiluwih dan bertindak untuk atas nama masyarakat Desa Pakraman Jatiluwih. Pihak Keempat (Bendesa Adat Gunungsari) mempunyai tugas penyelenggaraan aktifitas ritual di Desa Pakraman Gunungsari dan bertindak untuk atas nama masyarakat Desa Pakraman Gunungsari. Pihak kelima atau yang terakhir (Pekaseh) mempunyai tugas penyelenggara kegiatan persubakan di Subak Jatiluwih yang merupakan kawasan Daya Tarik Wisata Jatiluwih dan bertindak untuk atas nama krama subak Jatiluwih.

Namun dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata di manajemen Jatiluwih masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para stakeholder yang terlibat. **Pertama**, tantangan alih fungsi lahan di Desa Jatiluwih menjadi masalah yang serius karena dapat mengancam objek Daya Tarik Wisata Jatiluwih dicabut atas gelar dari warisan budaya dunia oleh UNESCO. **Kedua**, sistem *e-ticketing* di DTW Jatiluwih pada tahun 2024 masih dalam pengembangan. Sebelumnya DTW Jatiluwih memang sempat untuk menggunakan sistem *e-ticketing* namun terkendala pada jaringan internet yang buruk serta SDM yang kurang memadai. Masalah yang akan muncul jika masih menggunakan sistem *ticketing* manual adalah kehilangan data, efisiensi rendah, kurangnya transparansi, dan kurangnya integrasi data. Sehingga jika data-data tersebut hilang atau tidak beraturan akan berpengaruh ke dalam pendapatan yang nantinya akan masuk ke APBDes Jatiluwih. **Ketiga**, kurangnya sarana-prasarana sebagai penunjang Desa Wisata Jatiluwih. Selama perjanjian kerjasama yang berlangsung para pihak kolaborasi atau *stakeholder* belum memberikan pengembangan dalam sarana-prasana di Desa Wisata Jatiluwih.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2018:13) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam memahami situasi ilmiah. Metode ini memungkinkan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, gambaran, dan perilaku yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendeskripsikan serta mengkarakterisasi fenomena yang ada. Jenis penelitian ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah menggambarkan dan memahami implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan retribusi tiket entrance guna meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi dan pengelolaan retribusi tiket wisata.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kantor Pemerintahan Desa Jatiluwih serta Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Jatiluwih. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasan (2002:82) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari partisipan penelitian atau pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan utama, seperti Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Kepala Desa Jatiluwih, Manajer Manajemen Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Bendesa Adat Desa Jatiluwih, Bendesa Adat Desa Gunung Sari, serta Pekaseh Desa Jatiluwih. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah subjek yang menjadi fokus observasi. Unit analisis yang digunakan meliputi dokumen, informan, serta berbagai elemen lain yang berhubungan dengan penelitian. Observasi dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan dan Desa Jatiluwih, khususnya di kawasan objek wisata Desa Jatiluwih, guna memperoleh data yang relevan terkait implementasi Collaborative Governance

dalam pengelolaan retribusi tiket entrance.

Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada status Jatiluwih sebagai salah satu desa wisata terkemuka di Bali yang telah diakui sebagai situs Warisan Dunia UNESCO karena sistem subaknya. Popularitas global desa ini menjadikannya lokasi yang strategis untuk meneliti pengelolaan wisata berbasis budaya dan alam.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Sugiyono menjelaskan bahwa teknik purposive sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini mencakup individu yang memiliki peran signifikan dalam pengelolaan wisata dan pengambilan keputusan, seperti Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Kepala Desa Jatiluwih, Manajer Daya Tarik Wisata Jatiluwih, serta Bendesa Adat dan Pekaseh yang berperan dalam sistem subak.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati implementasi Collaborative Governance. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan, sedangkan dokumentasi mengumpulkan data dari berbagai arsip, laporan, dan literatur yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman dalam Herbani Pasolong (2012). Analisis ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih data yang paling relevan. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, atau bagan yang mempermudah pemahaman. Kesimpulan akhir ditarik dengan memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki kredibilitas tinggi serta didukung oleh bukti yang valid.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi data yang melibatkan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan disajikan dalam berbagai format, termasuk narasi deskriptif, representasi matematis, serta visualisasi dalam bentuk gambar atau grafik guna memperjelas hasil penelitian.

III. Pembahasan

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan maka adapun analisis hasil temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan retribusi tiket *entrance* untuk meningkatkan APBDes Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Adapun indikator-indikator yang terdapat dalam teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu Dialog tatap muka, Membangun kepercayaan, Komitmen terhadap proses, Berbagai pemahaman, dan Hasil sementara. Berikut penjabaran berdasarkan hasil analisis temuan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Komunikasi menjadi hal yang penting dalam memulai sebuah kolaborasi. Tanpa adanya komunikasi kolaborasi tidak akan terjadi. Semua proses kolaborasi terjadi melalui pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat. Pertemuan antar pihak menjadi syarat yang utama, karena akan berdiskusi tentang segala hal yang berkaitan dengan proses kerjasama. Dialog tatap muka sendiri merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan sepanjang kolaborasi (Ansell dan Gash, 2007) Selain itu, dialog tatap muka atau komunikasi langsung membantu mencegah potensi kesalahpahaman yang mungkin muncul dalam komunikasi tertulis atau elektronik. Tahap ini menekankan pentingnya komitmen terhadap proses, saling pengertian, saling menghormati, dan pembangunan kepercayaan. Hasil temuan menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tabanan yang diwakili oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan dengan Pemerintah Desa Jatiluwih dimulai sejak tahun 2013. Telah di sahkan pada Surat Perjanjian Kersama yang disepakati bersama.

Selama berlangsungnya kerjasama, PKS pun telah beberapa kali mengalami perubahan dan perbaikan atau ADDENDUM. Pada saat ini kolaborasi menggunakan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor: 556/1530/Dispar mengenai ADDENDUM Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih, Desa Adat Jatiluwih, Desa Adat Gunungsari, Pekaseh Subak Jatiluwih. Dinas Pariwisata dengan para pihak yang terlibat melaksanakan pertemuan tatap muka atau rapat rutin paling sedikit dua kali dalam sebulan. Atau, jika ada pembahasan yang mendesak maka akan diadakan rapat maupun pertemuan. Pada setiap pertemuan pembahasan yang dilakukan cukup spesifik seperti, pembahasan rutin setiap tahunnya untuk mempersiapkan acara festival Jatiluwih, mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, membahas hal-hal yang penting atau mendesak saat adanya konflik atau masalah, selalu membuka komunikasi tentang apapun di dalam ranah kolaborasi agar terus beroperasi secara optimal, serta membahas strategi-strategi untuk kedepannya.

Berdasarkan analisis temuan di atas, menunjukkan indikator *Face to Face Dialogue* dinilai sudah terlaksana secara optimal dan berhasil, karena kolaborasi memiliki pertemuan yang intens dan adanya jadwal pertemuan rutin seperti 3-4 kali dalam sebulan sehingga kolaborasi dapat terlaksana dengan efektif. Dengan penerapan indikator ini, kolaborasi antar *stakeholder* dapat berjalan optimal, meningkatkan pendapatan desa, dan memperkuat keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan dilakukan secara bertahap melalui rangkaian interaksi yang konsisten, adil dan menguntungkan kedua belah pihak. *Trust Building* juga merupakan elemen kunci untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama dalam kolaborasi. Kepercayaan adalah keyakinan atau rasa yakin pada seseorang yang melibatkan harapan adanya tindakan yang dapat diandalkan, jujur, konsisten dan niat baik tanpa merugikan pihak yang akan diberikan kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan, kolaborasi tidak akan berjalan dengan lancar karena setiap pihak mungkin memiliki rasa curiga atau enggan memberikan informasi. Indikator *trust building* mencerminkan bagaimana kepercayaan dapat terbangun dan dipertahankan, sehingga kolaborasi dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Desa Jatiluwih dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dengan sawah terasering yang telah diakui oleh UNESCO, pengelolaan retribusi wisata menjadi bagian penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa (APBDes). Pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata pada Desa Jatiluwih khususnya pada retribusi tiket wisata memiliki dasar kebijakan untuk mencapai tujuan yang sama dan selaras. Dalam konteks sebuah kolaborasi formal, terdapat prosedur kerjasama dan koordinasi yang telah disepakati bersama. Koordinasi ini dilakukan dengan membuat atau dikeluarkannya surat resmi tentang ikatan kolaborasi yaitu Surat Perjanjian Kerjasama. Pemerintah Kabupaten Tabanan membuat kolaborasi dengan Desa Jatiluwih memiliki tujuan agar subak yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tidak pudar dan terus dapat berkembang di zaman modern.

Upaya untuk membangun kepercayaan menurut Stephen M.R. Covey menjelaskan bahwa kepercayaan dibangun melalui karakter integritas dan kompetensi yang diberikan. Kepercayaan bisa dipercepat dengan menunjukkan transparansi, kredibilitas dan keandalan. Pemerintah Desa Jatiluwih dan Manajemen Pengelolaan DTW Jatiluwih memberikan data yang transparansi kepada seluruh pihak yang terlibat ataupun kepada masyarakat. Salah satu prinsip dalam membangun kepercayaan adalah transparansi. Dalam pengelolaan retribusi tiket wisata di Desa Jatiluwih, transparansi dapat diukur melalui sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang jelas, publikasi keuangan secara berkala dan sosialisasi penggunaan dana retribusi. Pemerintah Desa Jatiluwih sudah melaksanakan hal tersebut, maka sistem pengelolaan retribusi dapat menjadi lebih efektif, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan bahwa dana yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kemajuan desa.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, terlihat bahwa para pemangku kepentingan telah membangun kepercayaan dengan semua aktor, termasuk kepada masyarakat. Kepercayaan ini timbul dan dapat tumbuh karena adanya faktor komunikasi yang baik dan efektif antara para *stakeholder*. Dengan kepercayaan yang dibangun dengan baik, kolaborasi menjadi lebih efektif dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Dengan demikian, indikator *trust building* tidak hanya menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan

kesejahteraan ekonomi desa melalui sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa indikator *Trust Building* yaitu kepercayaan setiap antar *stakeholder* telah berhasil dan berjalan dengan baik di dalam kolaborasi.

Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Menurut Ansell and Gash (2007) mengatakan bahwa komitmen terhadap proses merupakan anggota dari *collaborative governance* yang merupakan proses kolaborasi penting dan juga dapat memfasilitasi jalannya kolaborasi. Adanya kondisi saling menguntungkan dan saling bergantung yang tinggi antara para pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Kolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi sebuah proses dari kegiatan kerjasama yang akan berkelanjutan dan saling menguntungkan satu sama lain. Komitmen berhubungan erat dari tingkat kepercayaan yang dihasilkan dari dialog tatap muka antar pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Komitmen yang dilaksanakan sangat penting karena komitmen dikaitkan sebagai dasar atau alasan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap pengambilan keputusan antar *stakeholder* merupakan pengaruh yang besar, karena setiap pihak memiliki peran di dalam kolaborasi.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih sudah tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama. Kolaborasi sudah berlangsung sejak lama dari tahun 2013. Surat PKS tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perbaikan atau yang disebut dengan Addendum. Selama 12 tahun berlangsungnya kolaborasi, Surat PKS telah di Addendum atau mengalami perubahan dan perbaikan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 2018, 2021, 2022, dan 2024. Pada tahun 2024 PKS kembali di Addendum dengan yang tercantum yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 556/1530/Dispar tentang ADDENDUM Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih, Bendesa Adat Jatiluwih, Bendesa Adat Gunungsari, dan Pekaseh Subak Jatiluwih. Dengan demikian komitmen para *stakeholder* dapat dilihat dalam Surat PKS karena telah menyetujui semua syarat dan tugas masing-masing. Komitmen dalam suatu kolaborasi menunjukkan faktor kunci dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan dari sebuah kolaborasi.

Berdasarkan analisis temuan yang telah di paparkan, menunjukkan bahwa indikator *Commitment to Process* telah berhasil dan berjalan secara efektif. Bentuk dari komitmen ini dapat dilihat dari kesediaan para pihak untuk terlibat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, perkembangan retribusi, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Pengelola wisata yang ada di bawah naungan Manajemen DTW (Daya Tarik Wisata) memastikan dan mengkoordinasikan teknis agar pemungutan retribusi berjalan secara transparan dan akuntabel. Komitmen dalam sebuah kolaborasi ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan pendapatan desa secara signifikan, tetapi juga menciptakan kolaborasi dengan sistem tata kelola yang transparan, berkelanjutan pada kesejahteraan masyarakat.

Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*)

Proses kolaborasi harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Dalam pemahaman bersama, setiap pemangku kepentingan harus mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi dari kegiatan kolaborasi dan memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Para pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif, pada tahap tertentu, perlu mengembangkan pemahaman bersama mengenai apa yang dapat dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama ini juga merupakan upaya untuk menyatukan persepsi terkait pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Berjalannya proses *share understanding* ini tidak akan pernah lepas dari peran pada proses *face to face dialogue* yang dilaksanakan oleh para *stakeholders*. Dengan *face to face dialogue* yang berjalan dengan baik akan mampu mengantisipasi kesalahpahaman yang berujung pada perbedaan persepsi. Proses *shared understanding* sendiri memudahkan dalam merencanakan langkah apa yang akan diambil oleh para *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama di dalam suatu kolaborasi. Dalam pengelolaan retribusi tiket wisata di Desa Jatiluwih untuk meningkatkan APBDes, *shared understanding* menjadi indikator utama yang mencerminkan sejauh mana seluruh aktor memiliki pemahaman yang seragam mengenai tujuan, peran, serta tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa indikator *shared understanding* telah berjalan dengan baik. Keberhasilan *shared understanding* dalam tata kelola ini ditandai dengan adanya komunikasi yang efektif, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta adanya persepsi

dan nilai yang sejalan di antara para aktor mengenai manfaat dan distribusi retribusi wisata. Para pemangku kepentingan saling memahami satu sama lain dengan cara saling berkomunikasi secara rutin dan dapat memecahkan permasalahan internal.

Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*)

Kolaborasi akan berlanjut ketika manfaat dan hasil dari tujuan kolaborasi dapat dirasakan nyata, meskipun hanya sebagian kecil dari proses kolaborasi. Keberhasilan kecil ini bisa menjadi dorongan untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan. *Intermediate outcome* adalah langkah-langkah atau tonggak-tonggak penting yang dapat diukur dan diamati selama perjalanan kolaborasi (Ansell dan Gash, 2007). *Intermediate outcome* dapat diartikan sebagai hasil antara yang menunjukkan kemajuan dalam proses kolaboratif sebelum mencapai tujuan akhir *collaborative governance* yang sukses ditandai dengan adanya komunikasi yang lancar dan efektif antar *stakeholder*. Koordinasi yang baik memungkinkan setiap pihak untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing serta bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan analisis temuan di atas menunjukkan bahwa indikator *intermediate outcome* telah membuahkan hasil yang positif dan berjalan dengan baik. Keberhasilan dalam tahap *intermediate outcome* ini juga tercermin dari adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola retribusi secara profesional, yang berdampak pada optimalisasi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur desa. Dalam setiap tahunnya Desa Jatiluwih mengalami peningkatan jumlah pengunjung, dengan demikian pendapatan dari retribusi juga semakin meningkat sehingga masuk ke dana APBDes. Selain itu, kolaborasi ini juga terbukti efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wisata. Dengan adanya sinergi antar pemangku kepentingan, diharapkan Desa Wisata Jatiluwih semakin maju dan lebih dikenal oleh wisatawan. Keberlanjutan hubungan kolaboratif menjadi target utama para *stakeholder* sehingga program-program yang telah berjalan dapat terus dikembangkan di tahun-tahun mendatang. Program-program tersebut seperti pengembangan sistem digitalisasi di desa wisata, strategi untuk meningkatkan jumlah pengunjung, dan merencanakan kegiatan festival Jatiluwih setiap tahunnya. Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai *intermediate outcome* menjadi bukti bahwa pendekatan *collaborative governance* dapat menjadi solusi efektif dalam mengelola sektor pariwisata secara transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat desa.

Jika aspek-aspek ini dikembangkan dan diperkuat, maka dalam waktu jangka panjang Desa Jatiluwih tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan desa secara signifikan, tetapi juga menjadi contoh bagi desa-desa wisata lainnya dalam mengimplementasikan tata kelola kolaboratif yang sukses dan berkelanjutan. Namun demikian, meskipun *intermediate outcome* menunjukkan hasil yang positif, tantangan seperti keberlanjutan sistem koordinasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan kapasitas SDM di tingkat lokal masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar keberhasilan ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemaparan hasil temuan wawancara yang telah dijabarkan melalui indikator proses *collaborative governance* yakni: (a) Dialog tatap muka, (b) Membangun kepercayaan, (c) Komitmen terhadap proses, (d) Berbagi pemahaman, dan (e) Hasil sementara dapat dihasilkan rangkuman hasil temuan yang dapat dituang melalui tabel berikut:

Berdasarkan tabel di atas dari lima indikator yang digunakan untuk mengukur proses *collaborative governance*, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih, Bendesa Adat Jatiluwih, Bendesa Adat Gunungsari, dan Pekaseh Jatiluwih dalam pelaksanaannya sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Dari 5 indikator, yaitu Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*), Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*), Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*), Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*) semua telah mencapai hasil yang baik dan berjalan dengan efektif.

Faktor Penghambat dan Pendukung

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *collaborative governance* pada pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata Jatiluwih. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor

diantaranya:

Faktor penghambat

Faktor penghambat dari implementasi *collaborative governance* terkait pengelolaan retribusi tiket wisata untuk meningkatkan APBDes Desa Wisata Jatiluwih memiliki dimensi yang kompleks, mencakup aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, serta teknologi. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas SDM di tingkat desa, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, masyarakat Desa Jatiluwih memiliki Sumber Daya Manusia yang sedikit, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Karena banyak faktor yang membuat masyarakat desa memilih untuk merantau ke luar daerah. Aparatur desa maupun pengelola destinasi wisata sering kali belum memiliki keahlian yang memadai dalam hal manajemen retribusi berbasis teknologi, dan pengelolaan konflik antar pihak. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pelaku pariwisata lokal, dan investor swasta, sering kali memicu tarik-menarik kekuasaan yang menghambat proses pengambilan keputusan secara kolektif.
2. Faktor teknis atau teknologi, dalam perkembangan era digital saat ini faktor teknologi menjadi tantangan besar dalam retribusi tiket wisata di Desa Jatiluwih. Minimnya penggunaan teknologi digital seperti sistem akuntansi otomatis membuat proses pencatatan pendapatan dari retribusi menjadi rawan kesalahan, kebocoran dan manipulasi. Dari sisi infrastruktur fasilitas yang mendukung dalam pengelolaan retribusi, seperti loket tiket belum modern, dan belum terimplementasinya dengan platform pembayaran daring.
3. Tantangan geografis dan lingkungan, Jatiluwih terletak di daerah perbukitan dan jauh dari perkotaan sehingga akses transportasi terbatas. Selain itu akses jalan dari segi infrastruktur masih sempit membuat perjalanan kurang nyaman bagi wisatawan. Hal tersebut memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan dan otomatis mempengaruhi pendapatan desa.
4. Tantangan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di Desa Jatiluwih menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara sektor pertanian dan pariwisata. Sebagai kawasan yang terkenal dengan sistem sawah terasering dan warisan budaya subak, perubahan fungsi lahan dari pertanian ke sektor lain seperti perumahan, vila, atau infrastruktur wisata dapat mengancam kelestarian lingkungan dan berkurangnya daya tarik wisata yang berbasis pertanian. Penyebab alih fungsi lahan karena adanya perizinan melalui online yang tidak *survei* atau turun langsung ke lapangan untuk mengecek lahan. Sehingga banyak para investor yang menyalahgunakan wewenang tersebut.

Faktor Pendukung

Terdapat berbagai faktor pendukung yang dapat memperkuat keberhasilan *collaborative governance* di Desa Wisata Jatiluwih. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Salah satu keunggulan utama dari Desa Jatiluwih adalah potensi wisata yang luar biasa, dimana Jatiluwih diakui sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO karena keindahan sawah teraseringnya yang menggunakan sistem irigasi tradisional subak. Pengakuan ini tidak hanya menarik wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga memberikan legitimasi internasional yang dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, adanya Badan Pengelola DTW Jatiluwih yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat lokal dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menciptakan pendekatan pengelolaan yang inklusif dan partisipatif.
2. Komitmen dari setiap *stakeholder*, dengan adanya komitmen yang kuat antara para pemangku kepentingan menjadi pendorong utama keberhasilan program ini. Berlandaskan pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 556/1530/Dispar hal ini dapat mendukung suatu proses kolaborasi karena sudah terikat secara tertulis, sehingga masing-masing pihak selalu berkomitmen dan selalu mencapai tujuan bersama. Dengan berpenderian pada visi dan tujuan yang ingin dicapai membuat kolaborasi berjalan dengan efektif. Pemerintah desa dan kabupaten telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung pengelolaan melalui alokasi dana serta kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Pemerintah

desa juga memberikan bukti transparansi dari dana yang diperoleh. Dukungan teknologi juga semakin berkembang, terutama melalui inisiatif untuk mengimplementasikan sistem tiket elektronik yang dapat mempermudah pencatatan pendapatan dan meminimalkan potensi penyimpangan. Di sisi lain, masyarakat lokal mulai menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam pengelolaan wisata sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan mereka.

3. Kinerja dari Pemerintah Desa Jatiluwih yang baik menjadi faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata, seperti pengalokasian Dana Desa untuk fasilitas pendukung pariwisata dan penguatan ekonomi lokal. Dengan semua faktor pendukung ini, serta komitmen untuk terus mengatasi tantangan yang ada, program *collaborative governance* di Desa Wisata Jatiluwih memiliki potensi besar untuk menjadi model keberhasilan pengelolaan wisata berbasis desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Dalam konteks Desa Jatiluwih, yang memiliki daya tarik wisata berkelas dunia berupa lanskap sawah terasering dan pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia, *collaborative governance* tidak hanya memungkinkan integrasi kepentingan berbagai pihak tetapi juga memastikan pengelolaan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal dan dinamika sektor pariwisata. *Collaborative Governance* yang telah dilakukan dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata sudah memberikan dampak yang cukup baik untuk masyarakat ataupun pihak lainnya. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan optimalisasi dari *collaborative governance* yang sedang berlangsung. Dalam menjalankan kolaborasi, tentu diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat mencapai tujuan. Oleh sebab itu, penulis bermaksud memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan agar nantinya pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata dan retribusi tiket wisata di Desa Jatiluwih semakin optimal. Adapun rekomendasi yang penulis berikan yaitu:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem tiket elektronik dan pembayaran elektronik, dengan mengembangkan sistem serba digital proses pencatatan transaksi tiket dapat dilakukan secara otomatis dan transparansi. Sistem ini tidak hanya memudahkan wisatawan dalam melakukan pembayaran, baik melalui aplikasi maupun pembayaran non tunai tetapi juga memberikan data akurat terkait jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan harian, dan pola kunjungan. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selain itu, sistem tiket elektronik mampu mengurangi potensi kebocoran pendapatan akibat pengelolaan manual, sehingga pendapatan asli desa dari retribusi dapat dioptimalkan.
2. Peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), untuk mendukung keberhasilan implementasi *collaborative governance*, pemerintah desa perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pihak yang terlibat dan para pengelola desa wisata untuk mengembangkan *skill*. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen destinasi wisata, pengelolaan keuangan berbasis teknologi, pemahaman terhadap prinsip-prinsip *collaborative governance*, serta keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dengan peningkatan kapasitas ini, pengelolaan retribusi tiket wisata dapat dilakukan secara lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan di lapangan.
3. Pihak yang terlibat dalam kolaborasi dapat melaksanakan evaluasi berkala, untuk penguatan mekanisme pengawasan dalam kerjasama yang terjalin. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi tiket sangat bergantung pada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif. Dalam melakukan koordinasi diharapkan agar semua pihak yang terlibat di dalam kolaborasi melakukan komunikasi yang lebih aktif lagi dan tidak ada hirarki yang terlalu menonjol di dalam melakukan sebuah kolaborasi. Dengan tujuan tidak ada lagi salah satu pihak kolaborasi yang berperan pasif dan dapat melaksanakan tugas dengan semestinya.
4. Penguatan regulasi dan kebijakan tata ruang. Langkah utama yang dapat diambil untuk permasalahan alih fungsi lahan adalah para *stakeholder* dapat memperkuat regulasi dan kebijakan mengenai tata ruang. Pemerintah dapat menetapkan aturan yang jelas mengenai perlindungan lahan pertanian agar tidak mudah dikonversi menjadi perumahan, *villa*, *restaurant* dan lain sebagainya.

IV. Penutup

Simpulan

Berdasarkan dari analisis hasil temuan yang diperoleh dari observasi dan wawancara mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Retribusi Tiket *Entrance* untuk Meningkatkan APBDes Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan indikator proses *Collaborative Governance* oleh Ansell and Gash (2008) yang terdiri dari Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*), Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*), Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*), Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*). Dari kelima indikator tersebut, semua indikator telah berjalan dengan optimal dan berhasil, ditemukan kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*) dalam kolaborasi pengelolaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih yang mengkhusus pada retribusi tiket *entrance* sudah berjalan secara optimal dan berhasil, hal ini dapat dilihat dari faktor pertemuan para *stakeholder* yang rutin dan mempunyai jadwal pertemuan yang intens yaitu 3-4 kali pertemuan dalam sebulan. Sehingga dapat mengobservasi kegiatan yang telah terlaksana dengan optimal.
2. Indikator Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) dalam kolaborasi ini dikatakan telah berjalan dengan baik, dapat dilihat para *stakeholder* saling memberikan dukungan satu sama lain sehingga membangun rasa kepercayaan kepada sesama. Kepercayaan yang terjalin antara pihak kolaborasi juga melalui transparansi dan menciptakan hubungan yang erat. Dengan adanya kepercayaan yang kuat, konflik kepentingan dapat diminimalisir, dan setiap pihak dapat bersedia untuk berkontribusi secara positif dalam upaya peningkatan APBDes melalui sektor pariwisata.
3. Indikator Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*) dalam kolaborasi ini telah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat di dukung karena dalam kolaborasi sudah dikeluarkannya Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 556 / 1530 / DISPAR (ADDENDUM PKS 2024) oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih, sebagai acuan atau komitmen dari para pihak kolaborasi. Para *stakeholder* juga mempunyai tujuan yang selaras sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan lancar.
4. Indikator Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*) dalam kolaborasi ini berjalan cukup baik, hal ini dikarenakan para *stakeholder* terbuka untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada terkait dalam pengelolaan pariwisata ataupun dalam kolaborasi sehingga mencapai pemahaman bersama. Salah satunya pemahaman mengenai tujuan bersama, terutama dalam meningkatkan pendapatan desa melalui retribusi wisata, dan memastikan sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan dana.
5. Indikator Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*) dalam kolaborasi ini sudah berhasil dan berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan yang pesat dan signifikan setiap tahunnya mulai dari jumlah pengunjung ke Desa Wisata Jatiluwih selalu meningkat sehingga pendapatan hasil retribusi juga meningkat. Sehingga hasil dari proses *collaborative governance* ini mencerminkan peningkatan efisiensi dalam pemungutan retribusi, dan meningkatkan pendapatan desa.

Dilihat dari ukuran proses *collaborative governance*, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih, Bendesa Adat Jatiluwih, Bendesa Adat Gunungsari, dan Pekaseh Jatiluwih dalam pelaksanaannya sudah optimal. Dari 5 indikator, yaitu Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*), Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*), Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*), Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*) semua telah mencapai hasil yang baik dan berjalan dengan efektif.

Saran

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan dalam pengelolaan desa wisata dan pengelolaan retribusi di Desa Jatiluwih yaitu:

1. Badan pengelola Daya Tarik Wisata dapat mengoptimalkan dan meningkatkan sistem elektronik pada tiket wisata dan pada sistem pembayaran. Tujuannya agar tidak ada kebocoran data atau pun manipulasi. Selain itu proses pemungutan lebih efisien, transparan, dan meningkatkan akurasi pencatatan retribusi wisata.
2. Optimalisasi penggunaan retribusi untuk keberlanjutan pariwisata dan pertanian. Agar retribusi tiket wisata memberikan dampak yang lebih signifikan bagi keberlanjutan pariwisata dan pertanian di Jatiluwih, perlu adanya optimalisasi dalam penggunaannya. Pemerintah desa dapat memastikan bahwa dana dari retribusi tidak hanya digunakan untuk infrastruktur wisata, tetapi juga dialokasikan untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan program konservasi lahan pertanian yang dibiayai dari dana retribusi, seperti program peremajaan tanaman, peningkatan kualitas irigasi, dan pelatihan pertanian berkelanjutan bagi petani lokal.
3. Meningkatkan literasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai desa wisata yang berkelanjutan. Diperlukan edukasi yang lebih intensif bagi masyarakat terkait pentingnya retribusi wisata dalam mendukung pembangunan desa. Program pelatihan atau sosialisasi bisa dilakukan agar masyarakat lebih memahami manfaat yang mereka peroleh dari sistem yang telah diterapkan. Dengan demikian, upaya pelestarian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi generasi mendatang serta memastikan bahwa Jatiluwih tetap dikenal sebagai kawasan wisata yang tidak hanya indah secara alamiah, tetapi juga kaya akan warisan budaya yang tetap lestari.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan sistem *collaborative governance* dalam pengelolaan retribusi tiket wisata di Desa Jatiluwih dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan APBDes serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571.
- Ansell, Chris, & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ansell, Christopher, Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & 't Hart, P. (2020). *Understanding inclusion in collaborative Governance: a mixed methods approach. Policy and Society*, 39(4), 570–591.
- BPS Provinsi Bali Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali September 2022. <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2022/11/01/717650/-perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-september-2022>.
- BPS Provinsi Bali. “Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Juli 2022.” <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2022/09/01/717648/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-juli-2022-.html>
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (memilih diantara lima pendekatan). In Penelitian Kualitatif (p. 634).
- DESA JATILUWIH “<https://jatiluwih.si-desa.com/first/wilayah>”
- DISPAR Provinsi Bali. “Desa Wisata Provinsi Bali November 2024”. <https://disparda.baliprov.go.id/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 29 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 84 Tahun 2013
- Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 UU Republik Indonesia
- Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 UU Republik Indonesia

- Purwanti, N. D. (2016). *Collaborative Governance* (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer). Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
- Putri, Putri Wirantari, Adi Sastra. 2024. Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir di kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. (Skripsi Sarjana. Universitas Udayana).
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Utama, Adi Sastra, Ketut Winaya. 2023. *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Ekowisata Subak di Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. (Skripsi Sarjana. Universitas Udayana).